

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anderson, James E. 1979-second edition. *Public Policy-making*. Holt, Rinehart and Winston: New York.
- Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rieneka Cipta, Jakarta.
- Entang Sastraatmadja, 1987, *Dampak Sosial Pembangunan*, Bandung: Angkasa, hal. 23.
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Justin M. Sihombing, 2005, *Kekerasan Terhadap Masyarakat Marginal*. Narasi, Yogyakarta: hal. 79
- Sarlito Wirawan Sarwono, 1978, *Masalah-masalah Kemasyarakatan di Indonesia*. Jakarta, Sinar Harapan, hal. 49.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali Press, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta
- Soetomo, *Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya*, 2008, Pustaka Pelajar.
- Syaukani, H.R. dkk, 2003, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Tadjuddin Noer Effendi 1993. *Sumber Daya Manusia, Peluang Kerja dan Kemiskinan*. Yogyakarta: Tiara Wacana, hal. 114.

Jurnal

Bagir manan, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, Media informasi Hukum dan peraturan perundang-undangan, Direktorat jenderal perundang-undangan kementerian Hukum dan hak Asasi manusia, Republic Indonesia, tanggal 28 Desember 2009

Bambang Setyadi, sebagaimana dalam makalah yang disampaikan dalam diskusi panel “kajian terhadap kebijakan-kebijakan yang perlu dibuat dalam Perda dalam rangka mendorong pengembangan usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM)” di bank Indonesia tanggal 29 Maret 2007, Buletin hukum perbankan dan kebanksentralan 1 volume 5 nomor 2 Agustus 2007.

Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Depsos RI, 2005 hal 7-8.

Ketua UPT Bina Karya DIY DIY Untung Sukaryadi dalam Kuliah Umum Ilmu Kesejahteraan Sosial, Rabu 25 September 2013.

Kesumawindayanti, N.F. dan Sahuri, C., 2014, Strategi Pelaksanaan Pembinaan Gelandangan dan Pengemis oleh UPT Bina Karya DIY dan Pemakaman Kota Pekanbaru, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol. 1 No.2.

Wicipto Setiadi, Proses pengharmonisasian sebagai Upaya peningkatan kualitas Peraturan perundang-undangan, Media informasi Hukum dan peraturan

perundang-undangan, Kementrian Hukum dan hak asasi manusia republic Indonesia, tanggal 4 September 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Skripsi/Tesis

Dharma, F.A.S., 2015, Implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di DIY, *Skripsi*, fakultas Syari'ah dan Hukum, Universits Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Nurdin, A., 2013, Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandagan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Makasar.

Wawancara

Dedi, Satpol PP, Wawancara 25 Agustus 2015.

Hafiz Jodi, Mahasiswa, Wawancara 24 Agustus 2015.

Joko, UPT Bina Karya DIY, Wawancara 1 September 2015.

Kondang, UPT Bina Karya DIY, Wawancara 31 Agustus 2015.

Sukinah, Pengemis, Wawancara 3 September 2015.

Sutomo, Satpol PP, Wawancara 25 Agustus 2015.

Warsinah, pengemis, Wawancara 3 September 2015.

Wijono, Pensiunan, Wawancara 24 Agustus 2015.

Wito, UPT Bina Karya DIY, Wawancara 1 September 2015.

Website

2015 jogja bebas gepeng, <http://dinsos.jogjaprov.go.id>, diakses tanggal 24 September 2015.

21 Jenis PMKS, [http://dinsos.jogjaprov.go.id/21 Jenis PMKS/](http://dinsos.jogjaprov.go.id/21_Jenis_PMKS/), diakses tanggal 5 Oktober 2015.

Diskusi Publik Kebijakan Hukum tentang Penanganan GEPENG di Yogyakarta dalam Perda No. 1 Th. 2014, <http://pkbh.uii.ac.id>, diakses tanggal 5 Oktober 2015.

Eben Ezer Siadari, Satu Harapan, Upaya Penyelesaian Masalah Gepeng Tak Cukup Sebatas Perda, [www.Satu Harapan Upaya Penyelesaian Masalah Gepeng Tak Cukup Sebatas Perda.html](http://www.Satu_Harapan_Upaya_Penyelesaian_Masalah_Gepeng_Tak_Cukup_Sebatas_Perda.html), diakses tanggal 1 Oktober 2015.

Implementasi Perda No. 1 Tahun 2014 dalam Seminar Kemitraan,

[www.Implementasi Perda No. 1 Tahun 2014 dalam Seminar Kemitraan_e-Parlemen DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.html](#), tanggal 27 Agustus 2014.

Jenis-Jenis PMKS, <http://dinsos.jogjaprov.go.id/Jenis-Jenis-PMKS/>, diakses tanggal 5 Oktober 2015.

Muhamad Waliyadin, Pembentukan Peraturan perundang-undangan dalam perspektif Pemerintah, <http://www.legalitas.org>, diakses tanggal 15 September 2010, jam 12.15 WIB.

Perda Gepeng di mata masyarakat, [www.RMM_Perda Gepeng di Mata Masyarakat_Wanderer Silles.html](#), diakses tanggal 15 Agustus 2015.

Tim Redaksi Tata Nusa, Anotasi Perundang-undangan republik Indonesia tahun 1945-2002, PT. Tata Nusa, Jakarta, 2003 sebagaimana dikutip oleh I Wayan Sudirta, Penuangan kebijakan daerah dalam peraturan daerah, <http://www.legalitas.org>, diakses tanggal 23 Agustus 2010 jam 12.35 WIB.

Zainul Asror, Fenomena Pengemis di Kota Jogja, social development and welfare – UGM, [www.Fenomena-Pengemis-di-Kota-Jogja.html](#), diakses tanggal 23 agustus 2015.

Media Massa

91 gepeng terjaring Razia, www.Republika.co.id, tanggal 27 januari 2015.

- Astama Izqi Winata, 2014, Targetkan bebas gepeng pada 2015, berikut program Unggulan Dinas Sosial, www.JogjaDaily.co.id, tanggal 7 Juli 2014.
- Danar Widiyanto, 2015, DIY Harus Bersih dari Gelandangan dan Pengemis, [www.Kedaulatan Rakyat Online Yogyakarta.co.id](http://www.KedaulatanRakyatOnlineYogyakarta.co.id), tanggal 31 Desember 2014.
- Gepeng di Yogyakarta Ternyata Wajah Lama, [www.Republika Online.co.id](http://www.RepublikaOnline.co.id), tanggal 12 Oktober 2013.
- Humas, 2014, DIY diharapkan bebas dari pengemis dan gelandangan, e-Parlemen DPRD DIY, Tanggal 19 Februari 2014.
- Jumlah gelandangan di Yogyakarta cenderung turun, www.antarayogya.com, tanggal 4 April 2015.
- Operasionalisasi Panti Karya hanya andalkan APBD Yogyakarta, www.Antaranews.com, tanggal 8 Desember 2013.
- Penghasilan pengemis-pengemis di Jogja raup Rp 200.000 per hari, www.jogjasolopos.com, tanggal 3 Desember 2013.
- Perda Gepeng-dituntut dibatalkan, setuju, www.HarianJogja.co.id, tanggal 24 April 2015.
- Perlu Aturan Teknis Untuk Menangani Gepeng, [www.Tribun Jogja.co.id](http://www.TribunJogja.co.id), tanggal 13 Januari 2015.
- Perlukah perda tentang gelandangan dan pengemis, www.kumham-jogja.info, diakses tanggal 15 Oktober 2015.

Pito Agustin Rudiana, Keraton Yogya Sumbang Lahan untuk Gelandangan,

www.Tempo Nasional.co.id, tanggal 11 oktober 2015

Pribadi Wicaksono, Ditentang, Perda Larangan Beri Uang Pengemis Ditunda,

www.TEMPO.CO, tanggal 05 Juni 2015.

Razia Gepeng di DIY Digencarkan Mulai Februari, www.Republika Online.co.id,

tanggal 13 Januari 2015.

Selama Januari 91 Gepeng Yogya Terjaring Razia, www.republika Online.co.id,

tanggal 27 Januari 2015.

Syarif Teguh, 2015, Malioboro dan titik nol harus bebas gepeng,

www.tribunjogja.com, tanggal 16 Januari 2015.

Tri Admoko, Kriminalisasi para “Dermawan Jalanan”, www.KOMPASIANA.com.,

tanggal 22 April 2015.

Yogyakarta,”Surganya” Para Gepeng, Kompasiana.com, tanggal 26 September 2013.

Virna P. Setyorini, Mensos tinjau 40 rumah pembinaan "gepeng" Yogyakarta,

www.Antaranws.com, tanggal 1 November 2015.